



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

LAPORAN KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) TAHUN 2021

PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



BEKERJASAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
DENGAN
BAGIAN ORGANISASI KABUPATEN TANAH LAUT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang maha Esa sehingga Laporan Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) ini dapat diselesaikan. Laporan ini menggambarkan penyelenggaraan FKP yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten tanah Laut di tahun 2021. Forum Konsultasi Publik merupakan salah satu unsur dari pelayanan publik dimana dalam Reformasi Birokrasi terdapat 8 (delapan) area perubahan utama pada instansi pemerintah di pusat dan daerah.

Laporan ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dengan munacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan merupakan amanat Peraturan Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang didukung oleh Peraturan Menteri alam Negeri Nomor 54 tahun 2010 terdapat beberapa tahapan atau proses dalam penyusunan RKPD meliputi penyusunan rancangan awal RKPD, musrenbang tingkat kampung dan kecamatan, penyusunan rancangan Renja SKPD, konsultasi publik rancangan SKPD, forum SKPD, musrenbang RKPD, penetapan RKPD dan penetapan Renja SKPD.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan FKP tahun 2021 ini kami sampaikan terima kasih.Semoga hasil pelaksanaan FKP menjadi masukan bagi kami dalam peningkatan penjangkaran aspirasi dari masyarakat guna peningkatan kualitas terhadap penyusunan dokumen RKPD kedepannya.

Pelaihari, 01 September 2021

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TANAH LAUT**


ANDRIS EVONY, S.STP,M.SI

Pembina Utama Muda

NIP. 19790928 199711 1 001

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan dan Manfaat	2
3. Ruang Lingkup	3
B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP	4
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	4
2. Penyelenggaraan dan Peserta FKP	4
3. Metode Pelaksanaan FKP	4
4. Susunan Acara FKP	4
C. HASIL PELAKSANAAN FKP	6
1. Identifikasi Masalah	6
2. Analisis	7
3. Rencana Aksi	7
D. PENUTUP	11
LAMPIRAN I Surat Undangan	
LAMPIRAN II Berita Acara Yang Ditandatangani	
LAMPIRAN III Salinan Daftar Hadir	
LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan	

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan dan akuntabel. Selain itu, pelibatan masyarakat lebih jelasnya tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan.

Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kebutuhan dasar dalam kerangka pelayanan publik. Untuk itu dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi antara Pemerintah sebagai Penyelenggara Pelayanan dengan masyarakat sebagai pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik (FKP).

Kegiatan FKP diselenggarakan dengan komunikasi dua arah, masyarakat dapat memberikan masukan dan saran kepada Penyelenggara pelayanan Publik atas layanan yang diterima sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian pengembangan. Guna memenuhi tugas tersebut dalam fungsi perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut perlu adanya melaksanakan penyerapan aspirasi, masukan, kritik dan saran dari berbagai pihak termasuk masyarakat, guna dapat menyerap aspirasi dan masukan dari masyarakat maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP).

Latar belakang dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik ini diharapkan dapat menjadi media pembentukan komitmen seluruh *stakeholder* agar dalam pelaksanaan pembangunan saling keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan APBD, yakni sebagai pedoman awal dalam penyusunan KUA dan PPAS.

Perlu diketahui bersama pula bahwa RKPD Kabupaten Tanah Laut harus mengacu pada dokumen RKP Nasional dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan, terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan serta mempertimbangkan kondisi yang terjadi saat ini untuk dilaksanakan tahun 2022, selain itu Forum Konsultasi Publik ini juga diselenggarakan untuk menyampaikan prioritas pembangunan dan untuk mendapatkan masukan penting terhadap rancangan awal dari *stakeholder*.

2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari diselenggarakannya Forum Konsultasi Publik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :

- 1) Memastikan penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- 2) Menyelaraskan kebijakan dan kondisi penyelenggara layanan dengan harapan publik dan meminimalisir dampak kebijakan yang dapat merugikan publik;
- 3) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik terkait pengawasan, evaluasi dan dukungan;
- 4) Mewujudkan implementasi Visi dan Misi Kabupaten Tanah Laut dalam rangka memicu terwujudnya Tanah Laut yang berinteraksi.

Manfaat yang diharapkan atas diselenggarakannya Forum Konsultasi Publik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah tersusunnya arah kebijakan pembangunan daerah dalam rancangan awal dokumen RKPD yang sesuai dengan aspirasi dan masukan dari berbagai pihak termasuk masyarakat yang pada akhirnya menjadi pihak yang menikmati dan memanfaatkan hasil dari pembangunan daerah.

3. Ruang Lingkup

Forum Konsultasi Publik pada Perencanaan Pembangunan Daerah melingkupi Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai acuan awal dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2022.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan pada Hari **Rabu** Tanggal **Tiga** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat sebagai Host Daring di **Aula Pencerahan Bappeda** dan ruang SKPD dan tempat masing-masing bagi peserta FKP.

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

Penyelenggara kegiatan FKP adalah Bidang Perencanaan Makro pada Bappeda dan **peserta FKP** adalah Bupati Tanah Laut, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut, DPRD Tk. II Kabupaten Tanah Laut, seluruh SKPD lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut dan tokoh masyarakat.

3. Metode Pelaksanaan FKP

FKP dilaksanakan **secara daring** dengan Bappeda sebagai host daring dan bertempat di Aula Pencerahan.

4. Susunan Acara FKP

Susunan acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No.	WAKTU (WITA)	ACARA	PETUGAS/ PENANGGUNG JAWAB
1.	08.00 – 08.30	Registrasi Peserta	Panitia
2.	08.30 – 09.00	PEMBUKAAN	Kasubbid SDM
		- Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	
		- Doa	Kasubbid Evdalren
		- Laporan Panitia Pelaksana	Kasubbid Sunram
		- Arahkan Bupati Tanah Laut sekaligus membuka acara Forum Konsultasi Publik Penyusunan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022	
3.	09.00 – 09.15	Paparan Secara Umum	Kepala Bappeda
	09.15 – 09.30	Paparan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2022	Kepala Bapenda
	09.30 – 09.45	Paparan Proyeksi Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2022	Kepala BPKAD

Lanjutan Susunan Acara FKP

No.	WAKTU (WITA)	ACARA	PETUGAS/ PENANGGUNG JAWAB
	09.45 – 10.45	DISKUSI	Moderator : Kabid Perencanaan Makro
	10.45 – 11.00	Penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal RKPD 2022	Asisten, PU, Tokoh Masyarakat
4.	11.00 – 12.00	PENUTUPAN / ISHOMA	MODERATOR

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam kegiatan FKP ini adalah permasalahan perencanaan dan evaluasi pembangunan yang terlaksana pada tahun sebelumnya guna perencanaan tahun 2022 yang lebih baik. Identifikasi permasalahan didapatkan dari hasil pemaparan dan diskusi (terlampir pada notulen kegiatan FKP) yang berlangsung dengan hasil sebagai berikut :

- 1) Tahun 2020 kita dihadapkan pada bencana covid yang merubah struktur pembangunan, begitu banyak kegiatan tahun 2020 yang terpaksa di tunda yang tentu saja membebani anggaran tahun berikutnya, hingga saat ini pandemi belum selesai, hal ini tentu menjadi perhatian kita semua dalam APBD tahun anggaran 2021,
- 2) Fokus penataan kota masih berpusat pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sehingga progress penataan kota pada slogan Bupati Tanah laut “Desa Dibina, Kota Ditata” masih kurang maksimal.
- 3) Dari sisi penerimaan pendapatan, pertumbuhan masih sangat rendah hanya 3% saja peningkatan setiap tahun, artinya belum luar biasa.
- 4) Saat ini kita mengalami banjir, diketahui bersama banyak infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat banjir
- 5) Permasalahan dalam proses Perencanaan dan pelaksanaan belanja langsung berupa Monev belum menjadi kebutuhan mendasar untuk perbaikan kinerja ke depan, Kemampuan Aparatur dalam perencanaan belum memadai, Pandemi covid yang juga menjadi penghambat dalam pembangunan, dijelaskan lebih lanjut berdasarkan monev yang biasa setiap 3 bulan belum menjadi kebutuhan mendasar evaluasi kinerja ke depan, dimana lakip orientasi hanya sebatas evaluasi bukan solusi.
- 6) Prioritas pembangunan 2022 yaitu Pemulihan Ekonomi dan Infrastruktur Pasca Bencana dan Pemenuhan Target-target Indikator RPJMD.
- 7) Belanja pegawai akses 5% untuk mengamankan kemungkinan peningkatan belanja pegawai dengan melihat pertambahan belanja pegawai di tahun sebelumnya, tahun 2022 kita harus banyak prihatin, karena pada P-APBD 2021 kita sudah harus melaksanakan perbaikan infrastruktur untuk mengatasi kondisi bencana yang menimpa Tanah Laut.
- 8) Belum adanya *grand design* dalam penataan kota

- 9) Kurangnya bantuan yang bersifat keagamaan saat terjadi bencana seperti peralatan ibadah, kitab suci dan sarana peribadatan.
- 10) Kurangnya produk-produk wisata religi di lokasi wisata religi Tanah Laut
- 11) Masih kurang berminatnya calon santri untuk bersekolah (mondok) di Pesantren di Kabupaten Tanah Laut.
- 12) Belum ada Sekolah Tinggi Agama Islam di Kabupaten Tanah Laut yang secara tidak langsung mengakibatkan tingginya pernikahan dini disebabkan banyak santri/santriwati yang menikah setelah lulus Aliyah (setingkat SMA)

2. Analisis

Dari hasil identifikasi masalah, permasalahan yang ada dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) bidang yaitu :

1. Bidang Perencanaan Makro
Meliputi masalah masih rendahnya pendapatan daerah, pengeluaran yang masih relatif tinggi, terdapatnya kegiatan yang tidak berdampak signifikan pada target RPJMD.
2. Bidang Ekonomi
Meliputi permasalahan kurangnya produk-produk lokal daerah
3. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Meliputi permasalahan pembangunan infrastruktur pasca bencana, pembangunan infrastruktur penunjang di perkotaan dan perencanaan pembangunan penataan perkotaan.
4. Bidang Sosial Budaya
Meliputi permasalahan kurangnya kemampuan aparatur, penanganan covid, penanganan bencana daerah, permasalahan pendidikan dan pernikahan dini.

3. Rencana Aksi

Berdasarkan analisa berdasarkan bidang kemudian dilaksanakan diskusi sesuai bidang dan didapat hasil rencana aksi sebagai berikut :

Bidang Perencanaan Makro

No.	Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	SKPD
1.	Pendapatan Daerah yang masih rendah	Menyusun kajian potensi pendapatan daerah	2021	Bapenda

2.	Terdapat kegiatan yang kurang signifikan dalam menunjang RPJMD	Melaksanakan verifikasi kegiatan	2021	Bappeda
3.	Rendahnya kualitas belanja daerah	Menerapkan belanja daerah berbasis kinerja	2021	BPKAD

Bidang Ekonomi

No.	Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	SKPD
1.	Kurangnya produk-produk lokal daerah	Akan memberdayakan UMKM lokal dan akan mempromosikan produk-produknya agar lebih dikenal dan diterima masyarakat	2021	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

No.	Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	SKPD
1.	Kerusakan Infrastruktur pasca bencana	Rekonstruksi dan rehabilitasi sarana dan prasarana akibat bencana	2021	DPUPRP DPRKPLH

2.	Belum maksimalnya Pembangunan Infrastruktur menunjang Visi dan Misi Bupati Tanah Laut “Desa Dibina, Kota Ditata”	Fokus pembangunan infrastruktur guna terwujudnya Visi dan Misi Bupati Tanah Laut “Desa Dibina, Kota Ditata”	2021	DPUPRP DPRKPLH
3.	Belum ada Grand Design Tata Kota	Penyusunan dokumen grand design perkotaan	2021	DPUPRP DPRKPLH

Bidang Sosial Budaya

No.	Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	SKPD
1.	Kurangnya kemampuan aparatur	Melaksanakan Diklat guna peningkatan kemampuan aparatur	2021	BKPSDM
2.	Penanganan Covid yang masih berlangsung	Bersinergi dalam penyelesaian penanganan Covid dalam segala sektor	2021	Dinas Kesehatan BPBD Dinsos

3.	Penanganan sosial pasca bencana daerah	Bersinergi dalam penyelesaian penanganan bencana alam dalam segala sektor	2021	BPBD Dinsos
4.	Kurangnya minat melanjutkan pendidikan di Tanah laut (lebih memilih melanjutkan pendidikan di luar Tanah Laut)	mempromosikan lembaga pendidikan baik formal maupun informal di Kabupaten Tanah Laut	2021	Disdikbud
5.	Masih terdapat pernikahan dini	Sosialisasi kepada para pelajar, pemuda/ pemudi tentang pernikahan	2021	DP2KBP3A

D. PENUTUP

Dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang dilaksanakan didapat hasil rembuk yang akan menjadi dasar dalam tahap pelaksanaan selanjutnya dalam penyusunan Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kegiatan FKP ini akan terus diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai bagian dari kegiatan penyusunan Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Demikian Laporan Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut ini disusun, semoga dapat memberikan informasi. Kritik dan saran sangat kami harapkan guna tersusunya laporan ini lebih baik kedepannya.

LAMPIRAN



BUPATI TANAH LAUT

Nomor : 050.13 /220 /Bappeda/2021
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Undangan Forum Konsultasi Publik
Rancangan Awal RKPD Tahun 2022**

Pelaihari, 27 Januari 2021

Kepada Yth,

.....
.....

Di – Tempat

Dalam rangka Penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022, bersama ini Saudara (i) diundang untuk berhadir pada :

Hari/Tanggal : Rabu / 3 Februari 2021
Pukul : 08.30 s/d selesai
Tempat : Zoom meeting ID 773 016 9047
Acara : Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal
RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

Demikian undangan ini disampaikan agar menjadi perhatian.
Atas partisipasi dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

BUPATI TANAH LAUT,



Catatan :
Registrasi peserta di mulai jam 08.00 – 08.30 Wita
Harap mencantumkan Nama Peserta beserta Nama SKPD saat join meeting



BUPATI TANAH LAUT

Nomor : 050.13 / 220 / Bappeda / 2021
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Undangan Forum Konsultasi Publik
Rancangan Awal RKPD Tahun 2022**

Pelaihari, 27 Januari 2021

Kepada Yth,

.....
.....

Di - Tempat

Dalam rangka Penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022, bersama ini Saudara (i) diundang untuk berhadir pada :

Hari/Tanggal : Rabu / 3 Februari 2021
Pukul : 08.30 s/d selesai
Tempat : Aula Pencerahan Bappeda Tanah Laut
Acara : Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal
RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

Demikian undangan ini disampaikan agar menjadi perhatian.
Atas partisipasi dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

JABATAN	PESTAF
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
BIDANG	

BUPATI TANAH LAUT,

H. SUKAMTA

Catatan :
Registrasi peserta di mulai jam 08.00 – 08.30 Wita

**BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK
KABUPATEN TANAH LAUT
UNTUK RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022**

Pada hari Rabu tanggal Tiga bulan Februari tahun 2022 secara daring melalui *zoom meeting* bertempat di Ruang Lounge untuk Bupati, Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan Asisten, serta ruang kerja masing-masing untuk peserta yang lainnya, telah diselenggarakan Forum Konsultasi Publik untuk Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan yang disampaikan oleh Bupati Tanah Laut
2. Pemaparan materi oleh Kepala Bappeda, Kepala Bapenda dan Kepala BPKAD
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Konsultasi Publik terhadap materi yang sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Forum Konsultasi Publik, maka pada:

Hari dan Tanggal	: Rabu, 03 Februari 2022
J a m	: 08.30 s/d Selesai
Tempat	: Zoom meeting ID 773 016 9047

seluruh peserta Forum Konsultasi Publik Kabupaten Tanah Laut

MENYEPAKATI

KESATU : Hasil diskusi dan pembahasan yang tercantum dalam notulen sebagai bahan Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini.

KEDUA : Rumusan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Forum Konsultasi Publik Kabupaten Tanah Laut untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Awal RKPD 2022.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.




Pelaihari, 03 Februari 2021

selaku pimpinan sidang
Forum Konsultasi Publik Kabupaten Tanah Laut

Bupati Tanah Laut






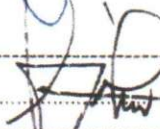


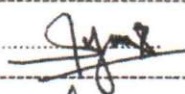
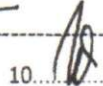
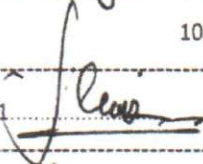

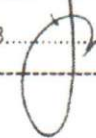




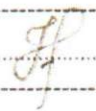
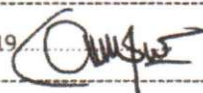



H. SUKAMTA


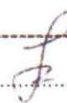
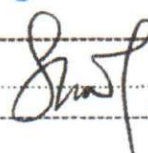




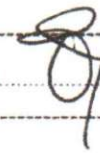


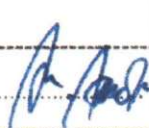
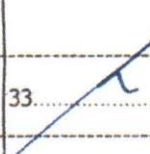

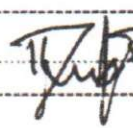

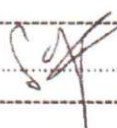


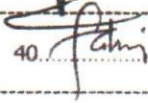
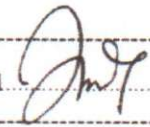
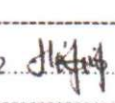



Mewakili peserta Forum Konsultasi Publik Kabupaten Tanah Laut


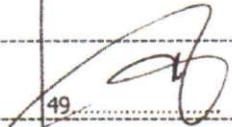
No.	Nama	Lembaga/Instansi	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. AHMAD SYARIPUDIN	IPI TALA	KATUN	
2.	H. DAHMAL KIELI		SERDA	
3.	AHMAD HAIKIN	SETDA	ASISTEN II	

DAFTAR HADIR

Acara : Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RRPD Tahun 2022
 Hari / Tanggal : Rabu / 03 Februari 2021
 Tempat : Aula Pencerahan Bappeda Kab. Tanah Laut

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	DEVI FIRRIANI	Jurnalis Kominfo	1. 
2	Guntoro	Kebid. IPW	2. 
3	Abdul Karim	Kesb. awal	3. 
4	Fusi S.W	Kasid. materi	4. 
5	ASEP SETIAWAN	Kesb. PERENCANAAN	5. 
6	Bahdar Phani	Analisis TL	6. 
7	Dewi Andriani	Kasidid Pang. Wilayah	7. 
8	Sari Sepaniz	ISB Kew	8. 
9	H. SYARIFUN DIN	ISI TAWAN LAUT	9. 
10	WITRI Wikayati	Kesb SDM	10. 
11	Hj. Yuliana	ICesbby Cmpg	11. 
12	Kesra	Bendahara	12. 
13	Fauzan R.	Kasid Eho SPA	13. 
14	Bayu	Kesb SPA	14. 
15	Si. Tealibah -y	Peng. Adm. Sam Pengas. Usaha	15. 
16	Hafizah	PTT	16. 
17	Rokda wati	staf	17. 
18	HERRY F	Kasidid Informatika	18. 
19	Apriyanti	PTT	19. 
20	Rina	PTT	20. 
21	Randi		21. 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
22	karun	Kesbang Sumra	22. 
23	Fatma	PTT	23. 
24	Safshari	Staf	24. 
25	Zainal	PTT	25. 
26	Anggi Pusrita Rini	Staf Bappeda.	26. 
27	Muswanfah	Staf	27. 
28	Istia	PTT	28. 
29	Ivan	Diskominpo	29. 
30	Iwan	Bappeda	30. 
31	Nuryulita A	"	31. 
32	MUFTAKHUL ANWAR	Kesb. Kesbang Eksekutif	32. 
33	A. Nopriadi	Bappeda	33. 
34	Riza N.	Kesb. Kelong Indus	34. 
35	Dila Arisanti	Kabard. Sosbud	35. 
36	Eddy Riyanto	PTT	36. 
37	M. Alimam	PTT	37. 
38	Murdiyani	Bappeda	38. 
39	WSPa		39. 
40	Fahmi	PTT	40. 
41	Heri	Diskominpo	41. 
42	Maulida Sani	PTT	42. 
43	Isna Sf	Kesb. Polpers	43. 
44	Vanti A	Pengadmiran Kru	44. 
45	Gumiyuni	Amars Sosbud	45. 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
46	ANDRIS EVONY	KABAH	46. Ace
47	MUSIH	SERBAN	47. Ace
48	Sabini	Bappeda	48. 
49	Emmohayel	Bappeda	49. 
50			50.
51			51.
52			52.
53			53.
54			54.
55			55.
56			56.
57			57.
58			58.
59			59.
60			60.
61			61.
62			62.
63			63.
64			64.
65			65.

DAFTAR HADIR

Acara : Forum Konsultasi Publik.
 Hari / Tanggal : Rabu / 03 Februari 2021
 Tempat : Ruang Lounge Kantor Bupati Tala.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H.M. Sukamta	Bupati	1. 
2	A. HERNAN	Ass II	2. 
3	DAHNIAL KIFLI	SEKDA	3. 
4	H. Samuel Ardan	Deputi Ahli	4. 
5	SAFAHAN	Ass III	5. 
6	M. Syahid	Kabag. Pem	6. 
7	HARTANI	PROTOKOL SETDA TALA	7. 
8	/ Bndi Umanu	Diskominfo	8. 
9	M. Tala Iskandar	Dokumentasi Pimpinan	9. 
10	Ferry	Dokumentasi Pimpinan	10. 
11	Daidi . N	Komunikasi Pimpinan	11. 
12	Tommy S	Diskominfo	12. 
13	Arif	Ajutan	13. 
14	Syarif	Ajutan Ass	14. 
15	Ametia Suci	Ajutan Bupati	15. 
16	KIRI	Ajutan Bupati	16. 
17	Nisa	Ajutan Sekda	17. 
18			18.
19			19.
20			20.
21			21.

NOTULEN RAPAT

Acara : Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kab. Tanah Laut TA. 2022
Hari / Tanggal : Rabu / 3 Februari 2021
Waktu / Tempat : 08.30 Wita s.d Selesai, Aula Pencerahan Bappeda Kab. Tanah Laut
Pimpinan Rapat/Moderator : Bupati Tanah Laut / Kabid Makro
Notulen : Kasubbid Politik dan Pemerintahan
Peserta Rapat :
1) DPRD Kabupaten Tanah Laut
2) Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut
3) Assiten
4) Staf Ahli
5) Kepala SKPD se Kabupaten Tanah Laut
6) Camat se Kabupaten Tanah Laut
7) LSM
8) Tokoh masyarakat
9) Poltek Negeri Tanah Laut

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik pada hari ini dalam rangka mewujudkan implementasi Visi dan Misi Kabupaten Tanah Laut dalam rangka memicu terwujudnya Tanah Laut yang berinteraksi, adapun hasil Forum Konsultasi Publik adalah sebagai berikut :

1. Laporan dari kasubbid penyusunan program :

Latar belakang dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik ini diharapkan dapat menjadi media pembentukan komitmen seluruh stakeholder agar dalam pelaksanaan pembangunan saling keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan APBD, yakni sebagai pedoman awal dalam penyusunan KUA dan PPAS.

Perlu diketahui bersama pula bahwa RKPD Kabupaten Tanah Laut harus mengacu pada dokumen RKP Nasional dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan, terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan serta mempertimbangkan kondisi yang terjadi saat ini untuk dilaksanakan tahun 2022, selain itu Forum Konsultasi Publik ini juga diselenggarakan untuk menyampaikan prioritas pembangunan dan untuk mendapatkan masukan penting terhadap rancangan awal dari stakeholder.

2. Bupati Tanah Laut :

Pada kesempatan ini Bupati Tanah Laut menyampaikan bahwa :

- 1) Forum Konsultasi Publik ranwal RKPD adalah merupakan satu tahapan dalam proses pembangunan daerah, terutama TA. 2022, kegiatan hari ini penting karena merencanakan pembangunan bukan pekerjaan yang mudah, karena tahun 2020 kita dihadapkan pada bencana covid yang merubah struktur pambangunan, begitu banyak kegiatan tahun 2020 yang terpaksa di tunda yang tentu saja membebani anggaran tahun berikutnya, hingga saat ini pandemi belum selesai, selama delapan bulan sudah lebih dari 1000 (seribu) kasus covid di Tanah Laut, sungguh merupakan kasus yang luar biasa, hal ini tentu menjadi perhatian kita semua dalam APBD tahun anggaran 2021, seluruh kegiatan harus di cermati dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagaimana merencanakan APBD tahun anggaran 2022, harus sangat selektif, bersyukur dengan situasi kebencanaan yang di hadapi saat ini kita masih bisa menyediakan bantuan-bantuan, menerima bantuan dari berbagai daerah, target APBD 40%, harus tajam dalam pencapaian sasaran-sasaran, bapak bupati berpesan agar dalam merencanakan kegiatan pembangunan tahun 2022 harus mengkalkulasi, tidak boleh terkesan bagi-bagi anggaran saja, fokus di mana merencanakan pembangunan, pembinaan desa dari tahun 2018 sudah sangat fokus, sekarang waktunya menata kota, tolong diperhatikan mana yang harus fokus, perlu diketahui bersama bahwa penata kota bukan hanya DPRKPLH saja, namun semua skpd bisa mengambil tempat sehingga penataan kota lebih terarah, semua SKPD punya peran, jadi sekali lagi tahun 2022 harus benar-benar kita fokuskan.
- 2) Dari sisi penerimaan pendapatan, pertumbuhan masih sangat rendah hanya 3% saja peningkatan setiap tahun, artinya belum luar biasa, pendapatan lain-lain dari pengelolaan keuangan daerah yang baik, belum lagi pajak dan retribusi, di tanah laut saat ini pajak terbesar hanya dari Penerangan Jalan Umum (PJU), tolong yang besar-besar masuk dalam premium sehingga pajaknya lebih besar, tugas untuk menggali pendapatan ini jangan diserahkan kepada bapenda saja, namun tugasnya semua SKPD, semangat dalam meningkatkan pendapatan, bukan semangat dalam belanja saja, masing-masing SKPD bekerja keras, memang tidak mudah, tapi bukan tidak bisa, yakni dengan kesungguhan kita semua.

- 3) Tahun 2022 agar fokus penataan kota, infrastruktur pelayanan publik/umum lebih di tingkatkan, Rumah Sakit Bumi Makmur, Kantor Catatan Sipil, kantor-kantor pelayanan umum, kebijakan-kebijakan di dorong untuk pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, sehingga diharapkan masyarakat belanja tidak keluar dari tanah laut, untuk stabilitas ekonomi.
- 4) Saat ini kita mengalami banjir, diketahui bersama banyak infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat banjir, kawan-kawan perhatikan infrastruktur mana yang biaya sendiri dari APBD, pusat dan provinsi, di perlukan data yang lebih cepat dan akurat agar segera diusulkan ke pusat dan provinsi, kecepatan dalam penyusunan data, mari bekerja tidak biasa-biasa namun bekerja luar biasa, sehingga penanganan akibat banjir tidak hanya di danai oleh daerah, penanganan banjir dapat di tangan dengan baik, demikian juga dengan covid dalam rangka melindungi masyarakat tanah laut, padat karya dari setiap SKPD untuk menjaga ritme ekonomi rakyat kita, apalagi rakyat yang tertimpa bencana, manfaatkan mereka untuk pekerjaan padat karya, ritme pembangunan dalam rangka masyarakat kita, sasaran yang tepat, sehingga masyarakat dapat maksimal teratasi masalah perekonomian.

Sesi paparan :

1. Paparan dari Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut

- ❖ Berkaitan tentang Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tanah Laut TA. 2022, setelah Forum Konsultasi Publik, dilanjutkan dengan musrenbang kecamatan, forum konsultasi, musrenbang kabupaten, selanjutnya draf RKPD TA 2022, untuk informasi awal saat musrenbang kecamatan, karena dalam rangka protokol kesehatan pelaksanaan tidak lagi perkecamatan seperti biasanya, namun persektor, dengan pola daerah pemilihan dimana nanti misalnya wilayah kecamatan jorong disatukan dengan kecamatan kintap, kecamatan takisung dengan kecamatan panyipatan, kecamatan kurau dengan kecamatan bumi makmur, kecamatan pelaihari dengan kecamatan bajuin dan kecamatan batu ampar, terakhir kecamatan bati-bati dengan kecamatan tambang ulang, disertai dengan pembatasan peserta, hanya skpd terkait, kepala desa, hanya ketua dan perwakilan, porkopincam.
- ❖ Visi dan misi pembangunan kabupaten tanah laut 2018-2023, hampir 100% dapat terserap, terdapat beberapa keunggulan Kinerja Pemerintah Kab. Tanah Laut Tahun 2020 yaitu terjadi Peningkatan Angka Indeks Pembangunan Manusia Kab. Tanah Laut beserta komponen pembentuknya seperti Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, Kabupaten Tanah Laut menjadi salah satu Kabupaten dengan kemajuan Pembangunan Manusia di tahun 2019-2020 dengan pertumbuhan 0,49% dan Terintegrasinya Perencanaan dan Penganggaran melalui Sistem Informasi Perencanaan Pemerintah Daerah (SIPD) walaupun pada tahun awal pelaksanaan masih banyak terdapat kendala dalam implementasinya.
- ❖ Kepala Bappeda juga menjelaskan secara menyeluruh terkait evaluasi pembangunan secara makro tahun 2020 dan rencana target untuk 2022, beliau juga menyampaikan bahwa tahun 2022 harus sudah fokus dengan target dan sasaran yang jelas, di mana kita harus melihat kondisi-kondisi dalam keadaan normal maupun upnormal, peserta rapat yang terhormat, permasalahan dalam proses Perencanaan dan pelaksanaan belanja langsung berupa Monev belum menjadi kebutuhan mendasar untuk perbaikan kinerja ke depan, Kemampuan Aparatur dalam perencanaan belum memadai, Pandemi covid yang juga menjadi penghambat dalam pembangunan, dijelaskan lebih lanjut berdasarkan monev yang biasa setiap 3 bulan belum menjadi kebutuhan mendasar evaluasi kinerja ke depan, dimana lakip orientasi hanya sebatas evaluasi bukan solusi.
- ❖ Sesuai arahan bapak Bupati bahwa dari awal tahun kita sudah fokus ke desa, baik berupa fisik dan hibah sehingga di tahun 2022 akan lebih fokus ke penataan kota sehingga nanti ada beberapa perubahan, pada perubahan tahun 2021 secara umum ada beberapa proyek pembangunan, recovery bencana banjir, secara umum rancangan awal rkpd 2022, ada 10 issue strategis, yang akan menjadi pedoman dalam penetapan rencana pembangunan tahun 2022.
- ❖ Prioritas pembangunan 2022 yaitu Pemulihan Ekonomi dan Infrastruktur Pasca Bencana dan Pemenuhan Target-target Indikator RPJMD, selain itu terdapat beberapa Fokus RKPD 2022 yaitu :
 - ✓ Pembangunan Gedung 5 Kantor Kelurahan dan 2 Kantor Kecamatan
 - ✓ Pemberdayaan BumDes, UKM, IKM (Produk Prioritas, Pemasaran, pembinaan, kemasan, harga jual, forum komunikasi antar IKM/UKM)
 - ✓ Pembinaan Kaum Melenial dalam pemasaran produk secara daring
 - ✓ Penanggulangan Desa Tertinggal di Kecamatan Bumi Makmur (Desa Pantai Harapan, Kurau Utara, Handil Birayang Atas, Handil Maluka)
 - ✓ Pembangunan satu puskesmas di Kecamatan Pelaihari (Desa Panggung)
 - ✓ Pemulihan fungsi-fungsi Sarana dan Prasarana Pertanian, Perkebunan dan irigasi
 - ✓ Pemberian Beasiswa kepada siswa/santri Berprestasi dan tidak mampu
 - ✓ Peningkatan dan Pengembangan Potensi dan Kebudayaan Lokal.
 - ✓ Pembangunan jalan, Jembatan dan Terminal Angkutan Darat
 - ✓ Penanganan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
 - ✓ Penataan Perkotaan dan Perencanaan Pengembangan Wilayah Kota

- ✓ Recovery Infrastruktur Pasca Bencana
- ✓ Pembangunan Kawasan Industri Jorong dan Pengembangan Pelabuhan Swarangan Jorong
- ✓ Pengelolaan Pembangunan dengan Pola Padat Karya

2. Paparan dari Kepala Bappenda Kabupaten Tanah Laut
Tentang proyeksi pendapatan Tahun 2022

- Kepala Bappenda menyampaikan bahwa proyeksi ini masih sangat-sangat sementara dan berharap angka-angka pada proyeksi ini kedepan akan meningkat dan bukan berkurang, adapun proyeksi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :
 - Pendapatan Asli Daerah (PAD) : Rp143.242.407.000,00
 - Pendapatan Transfer : Rp1.094.250.000.000,00
 - Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah : Rp37.000.0000.000,00
 - Sehingga total Pendapatan Daerah : Rp1,274,492,407,000.00
- terkait realisasi untuk tahun 2020 yang masih di audit oleh BPK Perwakilan Kalsel, bicara terkait pendapatan seperti yang telah disampaikan bapak bupati tanah laut bahwa pendapatan ini harus bersinergi antar stakeholder yang ada di tanah laut, kita harus lebih serius dan bekerja keras, di tahun-tahun terakhir ini saya melihat retribusi rekreasi dan pariwisata dapat dikembangkan lebih lanjut, dengan potensi yang ada mungkin dapat meningkatkan pendapatan daerah kita bersama.
- Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan TA. 2017 s.d. 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Uraian	Pertumbuhan (%)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9.07
1.1	Pajak Daerah	26.22
2	Dana Perimbangan	1.80
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang syah	20.96
	Rata-Rata	3.65

3. Paparan dari Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut

- Terkait proyeksi APBD TA. 2022, Kepala BPKAD menyampaikan bahwa belanja pegawai acress 5% untuk mengamankan kemungkinan peningkatan belanja pegawai dengan melihat pertambahan belanja pegawai di tahun sebelumnya, tahun 2022 kita harus banyak prihatin, karena pada P-APBD 2021 kita sudah harus melaksanakan perbaikan infrastruktur untuk mengatasi kondisi bencana yang menimpa tanah laut, terkait DAK agar memberi informasi data yang akurat, sehingga dengan data yang bagus kita akan mendapat dana DAK yang besar, untuk membantu pembangunan di daerah kita
- TA. 2022 Alokasi hibah dan bansos harus tercantum dalam RKPD, harus sudah lengkap dengan proposal.
- Dalam melaksanakan pembangunan harus bersinergi dengan provinsi dan nasional karena hal tersebut akan memudahkan daerah dalam menerima dana baik dari APBD Provinsi dan APBN, harus terpilah dan terarah.
- Asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBD TA. 2022 adalah :
 - Pendapatan daerah pada tahun anggaran 2021 tercapai 100%
 - Belanja daerah pada tahun anggaran 2021 mencapai 90%
 - Pembentukan dana cadangan dalam 2 tahapan, yaitu pada perubahan APBD tahun anggaran 2021 dan apbd tahun anggaran 2022
 - Dana alokasi khusus, baik fisik maupun non fisik tidak dicantumkan karena menunggu informasi resmi dari kementerian keuangan RI
- Yang harus menjadi perhatian adalah :
 - 1) Belanja diarahkan untuk pencapaian target pada RPJMD
 - 2) Belanja memperhatikan pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh DPRD
 - 3) Belanja pegawai untuk gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan dialokasikan sebesar Rp750.852.905.840,00 (sudah termasuk prediksi untuk belanja pegawai bos dan belanja pegawai blud).
 - 4) Alokasi terkait pendidikan sebesar 20% dari total belanja
 - 5) Alokasi terkait kesehatan sebesar 10% dari total belanja
 - 6) Alokasi untuk kelurahan masing-masing sebesar dana desa terendah pada TA 2021
 - 7) Belanja wajib lainnya, antara lain untuk honorarium PTT dan operasional kantor selama 1 tahun

Sesi diskusi

Sesi pertama

1. Bapak Arkani mewakili DPRD

- 1) DPRD mengapresiasi atas terselenggaranya FKP dalam rangka membahas ranwal 2022 artinya sudah melaksanakan amanat permendagri nomor 86 tahun 2017, tentu di forum ini akan memberikan petunjuk dan pedoman kepada pemangku kepentingan dalam menyusun renja 2022, tentang ranwal prinsipnya sudah bagus dan sangat rinci karena penjabaran dari RPJMD 2018-2023, artinya sudah memasuki tahun ke 4 dan sisa 1 tahun lagi yang merupakan pemantapan dalam pelaksanaan RPJMD.
- 2) Kami ingin menegaskan kembali sesuai regulasi bahwa pokir DPRD adalah salah satu unsur pembangunan daerah, jadi pokir harus tergambar secara jelas dalam penyusunan RKPD 2022 mendatang.
- 3) Kami sepakat bahwa pasca banjir dan sebagainya yang tidak terlepas dari penjabaran rpjmd kita, penanganan pasca banjir ini harus menjadi prioritas pembangunan termasuk jalan, irigasi, JUT, pembangunan sekolah dll.
- 4) Kami memperhatikan ada yang belum dibuat yaitu grand design penataan kota, ada grand design bagaimana kota di tata, supaya tidak kumuh, arus air berjalan sesuai jalannya untukantisipasi banjir.
- 5) Kaitan dengan peningkatan ekonomi, UMKM masyarakat, perlu di pertajam
- 6) Pada target kegiatan saya lihat ada on call yaitu dokter datang ke rumah penduduk, saya ingatkan agar tahun 2022 diperjelas apa yang dikerjakan terhadap on call
- 7) Belanja Modal jangan hanya 7-8% perlu di perbesar lagi, usahakan di tahun 2022 di atas 20% karena banyak infrastruktur yang rusak.
- 8) Agar sebelum menjadi RKPD dilaksanakan eksopse terlebih dahulu dengan DPRD.
- 9) Apa yang disampaikan kepala Bappeda dan BPKAD sudah sangat bagus, apalagi di masa pandemi pendapatan sudah melampaui target, barangkali dapat ditingkatkan lagi, terutama perda perlu di evaluasi lagi, pajak sarang burung walet, pajak bantuan bukan logam dan mineral perlu di maksimalkan, pajak PJU PLN sudah cukup bagus, tapi yang berkaitan non PLN agar lebih ditingkatkan.
- 10) Terkait belanja daerah terkait dana cadangan pilkada, hemat kami sudah terlambat kalau saat ini karena memerlukan waktu untuk penyusunan perda, mestinya tahun 2019 atau tahun 2020 sudah dicadangkan, saat ini kami lihat disusun tahun 2022, sementara pilkada dilaksanakan tahun 2024, saya pikir masih ada ruang untuk pencadangan ini, sehingga tidak terlalu berat beban anggaran kita, dana cadangan pilkada 100 M terlalu besar, cukup di bawah 80M saja, karena sebelumnya dana untuk KPU dan Bawaslu tidak sebesar itu, jadi harus bisa di press lg.

11) Sekian.

2. Bapak Sekretaris Daerah

- 1) menyampaikan ucapan terimakasih kepada kawan-kawan Bappeda, Bapenda dan BPKAD, dan berpesan agar kita semua memperhatikan apa-apa yang telah disampaikan oleh Bapak Bupati.
- 2) terkait penataan kota, kita harus bergerak cepat turun ke lapangan.
- 3) penerimaan pendapatan kita sepakat dan akan mengadakan koordinasi dengan bapenda.
- 4) untuk pasca bencana di laporkan bhw kami telah mendampingi deputi dari BNPB yang terdampak banjir ada di wilayah kita, kami akan memvalidasi data.
- 5) Padat karya mudah-mudahan akan kita tingkatkan.
- 6) hal-hal lain dalam rangka pelayanan kepada publik kita telah membentuk zona integritas yang terdiri dari beberapa SKPD untuk memberi pelayanan kepada masyarakat, mudah-mudahan nanti dapat meningkatkan birokrasi dan reformasi, yang dipertajam zona integritas dalam rangka meningkatkan kualitas kerja,
- 7) sepakat dengan apa yang disampaikan Bapak Arkani yang mewakili DPRD terutama terkait perda dana pencadangan, alhamdulillah sudah dilaksanakan.

3. Guru Syarifuddin mewakili tokoh agama dan masyarakat

- 1) memberikan arahan masukan untuk pembangunan 2022, kegiatan ini rutin setiap tahun, ternyata dari unsur keagamaan ini pertama kalinya dihadirkan, kebetulan kami adalah ketua IPI (Ikatan Pesantren Indonesia) Kabupaten Tanah Laut, ketua bidang dakwah di Kabupaten Tanah Laut, kami lihat dari paparan tadi sangat sedikit yang menyinggung keagamaan, sekolah yang dibangun banjir hanya SD, SMP, tidak ada Madrasah, Aliyah, tidak ada juga masjid, langgar, musholla, kami berkunjung ke pengungsian sekitar 400 pengungsi, maksud kunjungan agar bantuan yang diberikan tepat, karena fokus di keagamaan, yang menjadi masalah adalah fasilitas pengungsi untuk shalat, terutama mukena untuk wanita, ini menjadi PR kita untuk masyarakat yang terdampak banjir, dengan ketelantaran mereka terhadap pelaksanaan shalat.
- 2) Kurang laku produk-produk yang ada di daerah, pengalaman kami ziarah ke kota baru, sebenarnya yang dikunjungi biasa-biasa saja, cuma orang-orang tertarik untuk datang kesana berwisata religi, sedangkan di daerah kita memiliki sangat banyak tempat wisata religi, namun

wisata religi kita tidak tersentuh oleh pemerintah daerah, seandainya tempat religi tersebut di bantu oleh pemda dan dibarengi dengan penelitian tentang siapa yang meninggal itu, tokoh ulama itu, maka akan terbentuk manakip yang sangat baik bagaimana perjuangan dalam pengabdian kepada masyarakat dan akan menjadi daya tarik untuk ziarah ke tempat tersebut, bisa menarik wisata, seperti misalnya sejarah manakip datu nuraya, datu sanggul, sebenarnya daerah kita memiliki potensi wisata religi daerah, wisata religi itu ada kaitannya dengan produk lokal daerah, yang akan menjadi laku di beli oleh para wisatawan religi.

- 3) Terkait bea siswa untuk santri berprestasi atau tidak mampu, sebenarnya yang mengajukan atau ingin mengajukan banyak dari hadralmaut, namun diawal2 mereka ditakuti dengan bukti-bukti pengeluaran yang dirasa sulit, boardingpast dll, mereka tidak paham dengan kondisi seperti itu, demikian juga pulangnya, sehingga hal ini menjadi kendala dalam mereka meminta biaya untuk beasiswa, terkait beasiswa ke hadralmaut, kami pernah menyampaikan kepada pucuk pimpinan terdahulu namun pada akhirnya tidak sesuai dengan rencana awal, mereka datang dari hadralmaut namun tidak mengabdikan di tanah laut, sebenarnya pada awalnya digaris bawahi agar memilih yang dihajatkan oleh ponpes, sehingga bisa mengabdikan lagi di tanah laut, tidak mesti ke hadralmaut, bisa juga ke wilayah negara kita saja, karena banyak juga pondok-pondok yang bagus.
- 4) Kebetulan ada dari DPRD, kita sedikit mengingatkan dahulu kita pernah bertemu 2015, waktu itu bersama juga dengan ustadz Mukri Yunus dan beberapa ustadz yang ada, kami menginginkan ada perda ponpes/perda keagamaan, legislatif menyambut cukup bagus namun eksekutif menyambut dengan dingin, kami sangat berharap ada perda yang mengatur ponpes, karena ponpes cukup banyak, di..kemenag kurang pengaturan dan pengawasan ponpes, pendirian ponpes tidak ada pengaturan, ponpes berdampingan dengan ponpes baru, akhirnya ponpes yang ada habis muridnya.
- 5) Tentang pernikahan dini, anak usia 15-19 tahun, di ponpes assuhada lulus 15 tahun tingkat ustho, kemudian usia 17-18 tahun mereka lulus tingkat ulya, selanjutnya di tanah laut tidak ada sekolah lanjutan untuk agama, sehingga banyak yang langsung menikah, sehingga kami berencana membangun STAI, agar ada pendidikan lebih tinggi di tanah laut.

Tanggapan-tanggapan

1. Kepala Bappeda menanggapi terkait keinginan DPRD untuk ekspos terlebih dahulu dengan DPRD rencananya memang akan ada jadwal hearing minggu ke 2 atau ke 3 ke 4 bulan Maret 2021.
2. Kepala Bapenda, kami mengakui bahwa pendapatan daerah memang belum optimal, namun sebagai informasi PJU tahun ini kita realisasikan peruntukannya, kami menyadari pajak perusahaan yang menggunakan tenaga listrik memang masih beberapa yang belum direalisasikan, nanti kami akan koordinasikan untuk konteks kegiatan ini, pajak penggunaan untuk mencapai hampir 1M, kita juga akan melaksanakan koordinasi komponen apa saja untuk peningkatan atau optimalisasi pendapatan.
3. Kepala BPKAD menanggapi terkait dana cadangan, memang di proyeksi tahun 2022 40M mengikuti perda yang tengah disusun, direncanakan P-APBD tahun 2021 40M, total dana cadangan 80M, nanti kami menyesuaikan dengan perda, dapat kita susun dengan 3 tahap, P-APBD 2021, APBD 2022 dan APBD 2023.
4. Bapak Arkani mewakili DPRD, saya sudah mendengar yang cukup baik, grand design, perda pendapatan dan dana cadangan, semoga setelah ranwal dapat kita laksanakan lebih dalam, sepakat dengan kepala BPKAD, bahwa belanja hibah dan bansos harus masuk di RKPD.

Sesi kedua

1. Dari Kepala Dinas PU, Tata Ruang dan Pertanahan
 - 1) terkait dana DAK, di wacanakan agar segera upload tgl 26 Januari 2021, kami berharap agar segera dapat menggunakan dana DAK 2021 agar segera di tindak lanjuti, khawatir ada refocusing lagi.
 - 2) Berkenaan dengan grand design kota ada 14 fokus, kalau bisa diurutkan menjadi sasaran prioritas, masyarakat bertanya desa dibina kota ditata, locusnya agar menjadi yang nomor 1, dari yang 14 itu agar dijadikan skala prioritas.
 - 3) Saya juga akan klarifikasi mengenai data paska bencana banjir dan tanah longsor, mudahan bisa koordinasi dengan baik sehingga bisa memanfaatkan dana dari pusat, berharap untuk tahun 2022 kita bisa menggunakan dana APBN dan APBD Provinsi.

Tanggapan-tanggapan


1. Kepala BPKAD, berkaitan dengan masalah dana DAK, bukan terkait SIPD dan SIMDA, melainkan permasalahannya ada pada menu dari Kernendagri, menu DAK yang tidak ada, itu persoalannya, kepala BPKAD sekaligus juga mengingatkan kepada seluruh SKPD kami sudah konsultasi dengan BPKP di banjarbaru untuk kelancaran pelaksanaan APBD kita, tolong SKPD agar menginput,

seluruh kegiatannya ke simda dan berharap simda bisa kita gunakan sementara SIPD masih belum bisa digunakan.

2. Kepala Bappeda, kami sudah menyampaikan rancangan-rancangan normatif berbasis RPJMD, berbasis exiting yang ada dilapangan dan berbasis masalah-masalah SKPD yang ada di daerah, terakhir dari kepala dinas PU, Tata Ruang dan Pertanahan, kami sudah memfokuskan 14 rencana kegiatan tahun 2022, kami akan mengusahakan ada skala prioritas, sesuai arahan bapak bupati, dari DPRD pikir harus terampu, kami akan menyusun sesuai dengan kebutuhan prioritas.
3. Bapak Sekretaris daerah menambahkan bahwa kita akan tindaklanjuti dengan rapat bersama, contoh terkait pasca bencana, kita harus rapat koordinasi, kita harus mengejar waktu, kita tidak bisa diam, ada beberapa yang tidak tergenang rumah dapat kita rehab, rumah yang masih terendam belum dapat di rehab, terkait pendapatan nanti kita rapat koordinasi bertemu langsung tidak virtual, leading sektor yang menangani silahkan segera mengagendakan, terakhir saya sampaikan bahwa TMMD hari ini kami akan survei jalan tanjung menuju kiram, kami akan survei hari ini ke riam pinang.

Pelaihari, 5 Februari 2021

Notulen,



Isna Safriani, S.Sos

NIP. 19730329 199403 2 007

DOKUMENTASI



